



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 JUNI 2025

NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025

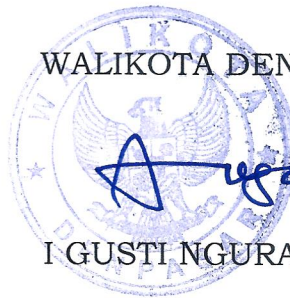
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



2025

RANCANGAN AKHIR

**RENJA KECAMATAN
DENPASAR UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara berpedoman pada Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (satu) Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024.

Denpasar, 19 Juni 2025
Camat Denpasar Utara



I Wayan Yusswata, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah.....	5
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	9
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	9
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2025 adalah tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perubahan dinamika pembangunan di wilayah kecamatan.

Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan, menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi terkini, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan serta untuk mengetahui capaian program dan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta potensi untuk perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan kegiatan perubahan Kecamatan Denpasar Utara tahun 2025;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD. TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) Tahun yang meliputi Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara selama tahun anggaran 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan selama 3 bulan terakhir, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara, antara lain :

Tabel 2.1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Kecamatan						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.336.591.533	32,28%	6.563.964.446	13.772.627.087
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	13.709.500.553	32,21%	4.416.370.533	9.293.130.020
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan	13.709.500.553	32,21%	4.416.370.533	9.293.130.020
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	1.186.406.200	34,52%	409.493.650	776.912.550
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	24.541.000	41,62%	10.215.000	14.326.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	912.988.800	32,67%	298.269.300	614.719.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	118.036.400	34,18%	40.345.400	77.691.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	108.452.000	48,59%	52.701.950	55.750.050
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 dokumen	22.388.000	35,56%	7.962.000	14.426.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.662.889.780	33,53%	1.563.262.223	3.099.627.557
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	513.200.000	23,46%	120.376.852	392.823.148
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	4.149.689.780	34,77%	1.442.885.371	2.706.804.409
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	777.795.000	22,48%	174.838.040	602.956.960
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 unit	432.285.000	21,08%	91.145.100	341.139.900
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 unit	345.510.000	24,22%	83.692.940	261.817.060

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	93,16	252.453.000	50,71%	128.009.000	124.444.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	221.095.000	54,63%	120.785.000	100.310.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 laporan	60.615.000	58,59%	35.515.000	25.100.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	160.480.000	53,13%	85.270.000	75.210.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	31.358.000	23,04%	7.224.000	24.134.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16	31.358.000	23,04%	7.224.000	24.134.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	3.881.867.442	25,56%	992.251.930	2.889.615.512
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	3.881.867.442	25,56%	992.251.930	2.889.615.512
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	6.556.000	45,00%	2.950.000	3.606.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 unit	1.265.641.442	0,00%	-	1.265.641.442
	Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	23 pokmas	2.609.670.000	37,91%	989.301.930	1.620.368.070
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	795.487.000	48,74%	387.707.000	407.780.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	795.487.000	48,74%	387.707.000	407.780.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	795.487.000	48,74%	387.707.000	407.780.000

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	170.920.000	16,09%	27.500.000	143.420.000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	170.920.000	16,09%	27.500.000	143.420.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	141.220.000	10,13%	14.300.000	126.920.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	29.700.000	44,44%	13.200.000	16.500.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	31.400.000	2,39%	750.000	30.650.000
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	31.400.000	2,39%	750.000	30.650.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	31.400.000	2,39%	750.000	30.650.000
	Total			25.468.718.975		8.100.182.376,00	17.368.536.599

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Berikut disajikan perubahan rencana pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

Berikut disajikan secara terinci Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatifnya yang berpedoman pada Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 Kota Denpasar disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15.459.077.278	17.003.475.659	1.539.970.381
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.407.556.688	14.523.761.069	1.116.204.381
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN, Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN.	64 orang/bulan, 1 tahun, 100%	13.407.556.688	14.523.761.069	1.116.204.381
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	385.176.650	389.604.650	4.428.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	9.368.000	9.368.000	-
	Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	296.752.650	306.658.650	9.906.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentasetersediannya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	25.689.000	25.689.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersediannya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	41.091.000	38.341.000	(2.750.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratran perundang-undangan yang disediakan, persentase tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	12.276.000	9.548.000	(2.728.000)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.269.905.940	1.467.891.940	197.986.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporam, 100%	300.400.000	300.400.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporam, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporam, 100%	969.505.940	1.167.491.940	197.986.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	396.438.000	622.218.000	225.780.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit, 100%	197.818.000	223.558.000	25.740.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	198.620.000	398.660.000	200.040.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%	257.053.000	253.053.000	(4.000.000)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	225.295.000	221.695.000	(3.600.000)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan, 100%	61.815.000	61.215.000	(600.000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen, 100%	163.480.000	160.480.000	(3.000.000)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	31.758.000	31.358.000	(400.000)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan; Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Dokumen, 100%	31.758.000	31.358.000	(400.000)

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	83.145.000	40.040.000	(43.105.000)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	83.145.000	40.040.000	(43.105.000)
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	1 Laporan, 100%	83.145.000	40.040.000	(43.105.000)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	177.075.000	170.920.000	(6.155.000)
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	177.075.000	170.920.000	(6.155.000)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 orang, 100%	147.375.000	141.220.000	(6.155.000)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen, 100%	29.700.000	29.700.000	-

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	32.200.000	31.400.000	(800.000)
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	32.200.000	31.400.000	(800.000)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	32.200.000	31.400.000	(800.000)
Kelurahan Tonja						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.409.956.050	1.602.432.230	114.147.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	241.197.050	355.344.550	114.147.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	4.660.000	4.585.000	(75.000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	195.880.050	317.618.550	121.738.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentase tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	17.621.000	15.605.000	(2.016.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	19.076.000	13.576.000	(5.500.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	3.960.000	3.960.000	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.050.833.000	1.119.429.680	68.596.680
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan, 100%	113.800.000	140.800.000	27.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan, 100%	937.033.000	978.629.680	41.596.680
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	117.926.000	127.658.000	9.732.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit, 100%	65.876.000	65.348.000	(528.000)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	52.050.000	62.310.000	10.260.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1.108.960.842	1.148.869.842	39.909.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.108.960.842	1.148.869.842	39.909.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga kemasyarakatan, 100%	1.506.000	1.506.000	-

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	471.740.842	471.740.842	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	635.714.000	675.623.000	39.909.000
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	234.391.000	237.391.000	3.000.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	234.391.000	237.391.000	3.000.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	234.391.000	237.391.000	3.000.000
Kelurahan Ubung						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.212.499.320	1.302.942.320	47.243.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.895.900	298.138.900	47.243.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	3.553.000	3.553.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	192.950.300	245.337.300	52.387.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentase tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	33.253.600	33.253.600	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	17.179.000	12.035.000	(5.144.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	3.960.000	3.960.000	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	801.198.420	844.398.420	43.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan, 100%	36.000.000	36.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan, 100%	765.198.420	808.398.420	43.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	160.405.000	160.405.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit, 100%	102.435.000	102.435.000	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	57.970.000	57.970.000	-
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	936.285.100	954.875.100	18.590.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	936.285.100	954.875.100	18.590.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga masyarakat, 100%	3.100.000	3.100.000	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	554.309.100	554.309.100	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	378.876.000	397.466.000	18.590.000

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	281.186.000	280.811.000	(375.000)
	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	281.186.000	280.811.000	(375.000)
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	281.186.000	280.811.000	375.000
Kelurahan Peguyangan						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.690.084.020	1.827.913.020	89.229.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	349.391.600	438.620.600	89.229.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 paket, 100%	6.960.000	6.960.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket, 100%	246.638.800	340.767.800	94.129.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, persentase tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket, 100%	41.472.800	41.472.800	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket, 100%	49.400.000	44.500.000	(4.900.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen, 100%	4.920.000	4.920.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.237.666.420	1.286.266.420	48.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan, 100%	63.000.000	63.000.000	-

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pperlengkapan kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan, 100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan, 100%	1.174.666.420	1.223.266.420	48.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	103.026.000	103.026.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit, 100%	66.156.000	66.156.000	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, 100%	36.870.000	36.870.000	-
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1.675.281.500	1.792.531.500	117.250.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.675.281.500	1.792.531.500	117.250.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga kemasyarakatan, 100%	1.950.000	1.950.000	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit, 100%	239.591.500	239.591.500	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas, 100%	1.433.740.000	1.550.990.000	117.250.000

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	249.470.000	246.170.000	(3.300.000)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	249.470.000	246.170.000	(3.300.000)
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Laporan, 100%	249.470.000	246.170.000	(3.300.000)

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta perubahan asumsi dan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 yang menyesuaikan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan, serta kondisi aktual di lapangan. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan tetap berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kecamatan.

Diharapkan dengan adanya Perubahan Renja ini, pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dapat lebih terarah, efektif, dan efisien serta mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan rencana kerja yang berkualitas dan tepat sasaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025;
- b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar

Utara Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025;

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan perubahan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.